

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2006 - 2007
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolkam
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 26 Februari 2007
Pukul : 09 .00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Masalah terorisme dan penanggulangannya
2. Pembangunan wilayah perbatasan/pulau terdepan berkaitan dengan integritas nasional

Hadir Anggota : 47 orang dari 48 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : 1. Menkopolkam, Sdr. Widodo AS
2. Menteri Dalam Negeri, Sdr. Moh. Ma'roef
3. Menteri Pertahanan, Sdr. Juwono Sudarsono
4. Panglima TNI, Sdr. Marsekal TNI Djoko Suyanto
5. Kapolri, Sdr. Jenderal Pol. Drs.Sutanto
6. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sdr. Fredy Numberi
7. Jaksa Agung RI, Sdr. Abdul Rahman Saleh
8. Kepala BIN, Sdr. Syamsir Siregar
9. Menteri Luar Negeri diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Sdr. Eddy Pratomo, SH, MA
10. Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh Dirjen Imigrasi, Sdr. Drs. Basyir Bermawi Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolkam pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2007 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II KESIMPULAN

1. Strategi pencegahan dan penindakan aksi terorisme dengan cara mencegah berkembangnya radikalisme dan mempersempit ruang gerak, perlu dilengkapi dengan upaya penanggulangan akar masalah munculnya aksi terorisme, yaitu antara lain ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan ketidakadilan. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya terorisme, meningkatkan peran berbagai komponen masyarakat, dalam penanggulangan munculnya aksi terorisme, yang dilakukan secara komprehensif dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah atau bekas daerah konflik secara bertahap. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Terorisme.

2. Pemerintah perlu menyusun strategi, program, dan rencana aksi yang menyeluruh dan terpadu untuk pembangunan daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan pendekatan border management dan division of labour serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan daerah dan keamanan wilayah, agar masyarakat dan wilayah perbatasan menjadi benteng kokoh keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Dalam hubungan ini, perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk pembangunan secara terpadu wilayah perbatasan khususnya pulau-pulau terdepan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana, kehadiran dan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau tersebut, termasuk prajurit TNI penjaga wilayah perbatasan.
3. Berkaitan dengan masalah perbatasan dengan Singapura serta hubungan Singapura dengan Indonesia secara keseluruhan, Komisi I DPR RI minta Pemerintah bersikap dan bertindak tegas dan memperjuangkan sungguh-sungguh kepentingan nasional dalam berbagai komitmen dan perjanjian yang telah ada maupun yang sedang dirundingkan, dan tidak membiarkan Singapura lebih dominan dan terkesan cenderung mendikte, termasuk dalam perundingan batas wilayah maritim, perjanjian FIR (*Flight Information Region*), dan pembahasan perjanjian ekstradisi serta pembahasan perjanjian DCA (*Defence Cooperation Agreement*).
4. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa RUU Perbantuan Militer perlu disiapkan secara matang oleh Pemerintah untuk diajukan dan dibahas bersama DPR RI, karena RUU tersebut dan RUU Bidang Pertahanan dan Keamanan lainnya sangat diperlukan untuk melanjutkan reformasi dibidang pertahanan dan keamanan serta untuk memastikan berbagai payung hukum dan regulasi bagi pelaksanaan fungsi keamanan nasional. Dalam hubungan ini, Menkopolkam perlu mengkoordinasikan penyiapan dan pembahasan RUU Perbantuan Militer dan RUU terkait lainnya yang berasal dari pemerintah, sebelum diajukan ke DPR RI.
5. Pemerintah supaya meningkatkan penegakan hukum dengan menindak tegas para pengusaha, eksportir, maupun pembeli dari Singapura, khususnya yang ditemukan masih melaksanakan pengolahan dan ekspor pasir laut maupun darat serta oknum-oknum aparat yang terbukti melindungi penjualan pasir yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum.
6. Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah mengevaluasi Program NAMRU-2 (*Naval American Medical Research Unit-2*) yang telah berlangsung selama hampir 40 tahun dan dalam evaluasi tersebut apabila terdapat temuan bahwa program NAMRU itu tidak mendatangkan keuntungan yang memadai bagi kepentingan Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, agar program tersebut dihentikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.55 WIB.

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA